

## ABSTRAK

**Imam Solahudin** : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Kota Bandung (Studi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Inklusif)

Kebijakan dalam bidang pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, maka harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan akses pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (penyandang kelainan dan kelompok anak kurang beruntung lainnya). Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bandung melalui Kelompok kerja inklusif (Pokja) Dinas Pendidikan Kota Bandung masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang berusia sekolah ada yang belum menikmati layanan pendidikan itu di karenakan sekolah di Kota Bandung masih belum semua menjalankan kebijakan pendidikan inklusif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif untuk ABK di dinas pendidikan kota bandung dan hambatan dan solusi dalam implementasi kebijakan pendidikan di dinas pendidikan kota bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Marilee Grindle dalam Leo agustino (2016). Indikatornya terdiri dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif menurut Miler dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasinya belum berjalan dengan baik, Sebagian besar Komite Sekolah belum mengambil peran aktif dalam menunjang implementasi pendidikan inklusif dengan dibuktikan dengan jumlah sekolah yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif baik negeri dan swasta itu baru 14.94% untuk SMP dan 42.48% untuk SD, seharusnya seluruh sekolah di kota bandung harus sudah menjalankan kebijakan pendidikan inklusif. Kondisi SDM pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai sistem belum sama/ merata --- mindset yang berbeda mengenai pendidikan inklusif (pimpinan sekolah, guru, orangtua, peserta didik). Peneliti memberikan saran agar pemerintah melakukan pengawasan dan pelatihan ke pihak-pihak sekolah agar dapat mengetahui peran dan fungsinya dalam pendidikan inklusif.

**Kata Kunci** : Implementasi. Kebijakan Publik, Pendidikan Inklusif